

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Baso,Iriyanto Ence. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ke-2. (Bandung: Alumni, 2008).
- Al Atok,Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ,”Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Negara Bicameral”*. Cetakan ke- 1. (Malang: Setara Press, 2015).
- Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Andayani,Dwi Budisetyowati dan Clarisa Chevly Diory. *Politik Hukum (Pelaksanaan Pemilu Serentak)*. (Jakarta: Rafikatama, 2017).
- Asshiddiqie,Jimly. *Kemerdekaan Berserikat. Pembubaran partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Asshiddqie,Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Asshiddiqie,Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Asshiddiqie,Jimly. *Konstitusi Bernegara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi)*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2015).
- Budiardjo,Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-17. (Jakarta: Gramedia, 1988).
- Efriza dan Yoyoh Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik”Kajian Mendasar Ilmu Politik”*. (Malang: Instrans Publishing, 2015).
- Fajar,Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Fadlil Ahmad,Sumadi. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah konstitusi*, Cetakan Ke-1, (Malang: Setara Press, 2013).

- Handoyo,Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).
- Huda,Ni'matul. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ilmar,Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Marijan,Kacung. *Sistem Politik Indonesia “Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru”*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Marzuki,Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nurtjahjo,Hendra. *Ilmu Negara. “Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen”*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).
- Pamungkas,Sigit. *Perihal Pemilu*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009).
- Rahadiansah P,Trubus. *Pengantar Ilmu Politik*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014).
- Redi,Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2015).
- Soeprapto,Maria Farida Indarati. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Tahir Azhari,Muhammad.H. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara. Hukum Pidana. Dan Hukum Islam*. Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Thoha,Miftah. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*. Cetakan ke-3. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

_____. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*.

A. Jurnal, Artikel, Internet

Anonim. "Pemilu 2019 Serentak". (Lima Kotak Pemilu 2019)". *Majalah Konstitusi* Edisi No. 84 Februari 2014.

- Anonim. “Diwarnai Aksi Walk Out DPR Sahkan Undang-undang Pemilu”. *nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/*, diakses tanggal 29 Januari 2018.
- Dwi Andayani. “Dapat Nomor Urut 20 PKPI Resmi Jadi Peserta Pemilu 2019”. *www.m.detik.com/news/berita/d-3969293*, diakses tanggal 4 Februari 2019.
- Lilik Eka Aprillia. “Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998 www.repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61729, Diakses tanggal 12 Desember 2018.
- Didik Supriyanto. “Obesitas Undang-Undang Pemilu Kemalasan dan Kepentingan”. *nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/*, Diakses tanggal 5 Oktober 2018.